

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam administrasinya, termasuk masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Indonesia, sebagai contoh, sering menghadapi konflik, kerusuhan, serta masalah sosial-ekonomi, terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan demi upaya menciptakan masyarakat sejahtera. Kemiskinan di Indonesia menjadi perhatian yang terus-menerus diperbaharui karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat disetiap tahunnya (Setyawardani et al., 2020).

Prediksi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal DUKCAPIL, pada tahun 2022 bulan Juni jumlah masyarakat di Indonesia sebesar 275,36 juta jiwa. Jumlah yang disampaikan mengalami peningkatan sebesar 1,48 juta jiwa atau 0,54% dari jumlah pada Desember 2021 (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022). Pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak pada masalah kemiskinan karena lebih banyak orang yang harus memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan (Devanantyo, 2021).

Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, yang menyebabkan banyak orang menjadi pengangguran. Selain itu, ada juga pengangguran terselubung di mana orang tidak produktif dalam pekerjaannya. Di masyarakat Indonesia, jenis pengangguran ini cukup umum terjadi. Artinya, meskipun banyak keluarga yang mempunyai pekerjaan, namun mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Syamsir (2014), Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Buruknya kualitas hidup seseorang disebabkan oleh rendahnya pendapatan.

BPS mengembangkan standar kemiskinan yang mencakup beberapa kategori, seperti: Tidak miskin, yaitu pengeluaran bulanan per orang melebihi Rp350.610. Hampir tidak miskin, dengan rata-rata pengeluaran bulanan berkisar Rp 280.488 - Rp 350.610. Kategori mendekati miskin, berkisar Rp 233.740 - Rp 280.488. Apalagi mereka tergolong miskin, dengan pengeluaran kurang dari Rp 233.740 per orang per bulan. Sangat rendah, biaya bulanan pasti per orang tidak diketahui.

Kategori diatas memaparkan bahwa di Indonesia masih banyak yang mengalami kemiskinan, terutama di perkotaan. Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di perkotaan meliputi kurangnya lapangan kerja, banyaknya anak dalam sebuah keluarga, serta rendahnya kesehatan dan tingkat pendidikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh akses terbatas terhadap layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemiskinan menghambat kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan pekerjaan layak, dan akses memadai bagi kesehatan, yang secara keseluruhan mempengaruhi indeks pembangunan masyarakat di Indonesia. Kemiskinan juga menjadi fokus dalam pergerakan nasional, menjadi dorongan untuk mencapai kemerdekaan dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kesehatan dan pendidikan rendah di kalangan penduduk miskin ini juga berdampak pada produktivitas mereka, meningkatkan tingkat ketergantungan di kalangan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan rendah.

Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat Tangguk Bongkar VI seperti perempuan dan anak-anak yang berakibat pada terancamnya

masa depan, dikarenakan kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah masyarakat miskin di Tangguk Bongkar VI saat ini berdasarkan data terbaru dari Kantor Kelurahan Tegal Sari Mandala II sebagai berikut yang dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Tangguk Bongkar VI Tegal Sari Mandala II

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2019	14,57%
2020	14,51%
2021	14,69%
2022	14,21%
2023	14,10%

Sumber: Lurah Tegal Sari Mandala II

Banyak dampak buruk dari kemiskinan termasuk meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, dan putus sekolah di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi permasalahan serius untuk ditanggapi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan sejumlah inisiatif untuk memerangi kemiskinan, termasuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Perpres Nomor 15 Tahun 2010 menguraikan beberapa strategi pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Hal ini termasuk mereduksi tanggungan keuangan masyarakat miskin, mengoptimalkan pendapatan serta keterampilan mereka, usaha kecil dan mikro diciptakan dan mempertahankannya, serta mengoordinasikan upaya untuk mengurangi masalah tersebut. Upaya ini kemudian diimplementasikan dalam program secara tertuju kepada menysasar sasaran kemiskinan, termasuk Program Keluarga Harapan.

Guna mempercepat pengembangan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, pemerintah meluncurkan suatu program bernama PKH berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial. Undang-undang ini kemudian dikerucutkan dalam Perpres No. 15 tahun 2010. Pendekatan praktis untuk mengentaskan kemiskinan dikenal dengan istilah “pocket kemiskinan”, yang mempertimbangkan tantangan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa terdaftar sebagai penerima PKH yakni, mempunyai kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai bukti kewarganegaraan. Termasuk dalam golongan kelompok yang membutuhkan bantuan yang terdata di kelurahan setempat. Bukan merupakan anggota TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi, gaji, atau Kartu Pra Kerja sebelumnya. Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Kemensos RI.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan No. 32/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang

Program Keluarga Harapan Tim Pengendali Program. Ketika program ini pertama kali dilaksanakan, PKH digunakan sebagai uji coba untuk menguji komponen-komponen utama seperti strategi penargetan, verifikasi kebutuhan, sistem pembayaran, dan saluran pengaduan masyarakat. Membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi sebagian besar bergantung pada kesehatan dan pendidikan, dan hal ini secara langsung mendukung keberhasilan dan kemajuan ekonomi yang konstruktif di masyarakat.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah yang telah teridentifikasi sesuai kriteria. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi untuk menjadi KPM PKH antara lain kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ibu hamil dan keluarga berpenghasilan rendah dengan anak balita termasuk kelompok yang berhak mendapatkan bantuan kesehatan. Dalam hal pendidikan, bantuan juga diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah yang anak-anaknya, yang berusia antara 6 dan 21 tahun, pendidikan selama 12 tahun wajib sekolah belum terselesaikan. Sementara itu, rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas berat juga berhak menerima bantuan kesejahteraan sosial. Penerima bantuan harus mematuhi kewajiban tertentu, seperti memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita, menjamin kehadiran minimal 85% anak di sekolah, serta melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia dan penyandang disabilitas berat di puskesmas atau dengan tenaga kesehatan serta ikut dalam kegiatan sosial.

Program Keluarga Harapan di Sumatra Utara berawal dari Kecamatan Medan Denai tepat ditahun 2008. Program ini memberikan pertolongan kepada 6 kelurahan

yang salah satunya adalah Kelurahan Tegal Sari Mandala II, yang terletak di Medan Denai dan menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, mirip dengan situasi di Tangguk Bongkar VI. Masalah utama yang dihadapi di Tangguk Bongkar VI adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Sebagian besar penduduk bergantung pada pekerjaan seperti pemulung, pekerja, pengembala ternak, sopir becak, ahli servis kendaraan, pengemudi angkutan umum, dan penjual barang. Meskipun bekerja, pendapatan yang diperoleh seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang layak. Ketimpangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan hasil yang didapatkan menjadi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat di sana.

Selama Program Keluarga Harapan berlangsung, terlihat bahwa meskipun banyak masyarakat di Tangguk Bongkar VI menerima bantuan ini, kehidupan mereka belum mengalami perubahan yang baik. Masih banyak kekurangan dalam memenuhi biaya hidup, sehingga tidak dapat dipastikan apakah keberadaan Program Keluarga Harapan telah berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Tangguk Bongkar VI. Oleh karena itu, peneliti memilih Tangguk Bongkar VI, Kelurahan Tegal Sari Mandala II sebagai lokasi penelitian untuk menyelidiki "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Tangguk Bongkar VI, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan". Keberhasilan PKH untuk mengurangi kemiskinan tergantung pada ukuran terhadap suatu perubahan yang terjadi dan apakah perubahan merupakan akibat dari program tersebut ataukah ada penyebab lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian penelitian terdahulu untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan

(PKH). Pertama dari penelitian terdahulu, Aprilia Saraswati (2018) tentang "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandan Surat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)" memperlihatkan hasil dimana PKH berpengaruh negative dan signifikan dalam memerangi kemiskinan. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai-nilai Ekonomi Islam seperti pemerataan hak, kewajiban, dan saling membantu. Saat ini, Program PKH berfungsi sebagai mekanisme pemberian jaminan dari pemegang kekuasaan untuk rakyat, namun implementasinya masih perlu meningkatkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab agar PKH dapat berjalan secara efektif. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mardaus, dan Afriva Khaidir pada Tahun 2021 dengan judul "The Influence of the Family Hope Program (PKH) Policy on Community Welfare in Kubung District, Solok Regency." Hasil dari penelitian ini Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Kubung berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari seluruh kegiatan dalam implementasi kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kubung dengan prosentase 32,7%. Sementara itu, 67,3% dipengaruhi oleh faktor lain seperti program pemberian modal usaha kepada penduduk kecil, bantuan kesehatan seperti Jamkesmas/BPJS gratis bagi masyarakat miskin, bantuan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan lainnya. Berbagai hasil penelitian diatas terlihat bahwa PKH menghasilkan pengaruh yang positif dari segi selama pelaksanaan PKH, akan tetapi berbagai penelitian diatas belum ada yang menjelaskan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan PKH untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tangguk Bongkar VI Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut ini:

1. Kemiskinan sudah menjadi masalah serius di tiap negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga harus segera diatasi.
2. Tangguk Bongkar VI, Tegal Sari Mandala II, merupakan wilayah dengan lulusan Pendidikan akhir Sekolah Dasar terbanyak, dan pengangguran terbanyak.
3. Diperlukan pembuatan program-program yang dapat mengurangi kemiskinan.
4. Pengaruh PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Tangguk Bomgkar VI Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

THE
Character Building
UNIVERSITY

1.3 Batasan Masalah

Tujuan dari penentuan ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memfokuskan dan mengarahkan pembahasan agar tidak meluas, sehingga mencapai tujuan penelitian dengan lebih efektif. Peneliti memfokuskan objek hanya tertuju ke masyarakat dan keluarga miskin penerima manfaat di Tangguk Bongkar VI, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Tangguk Bongkar VI, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan?
2. Seberapa besar Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Tangguk Bongkar VI, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Tangguk Bongkar VI, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Tangguk Bongkar VI, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tambahan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pihak berwenang dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama terkait dengan dampaknya kepada keterwujudan masyarakat yang sejahtera di Tangguk Bongkar VI.

